



Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Selama Periode 2001-2021

Safira Hamida¹, Abdul Aziz Ahmad^{2*}

^{1,2*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Corresponding Author: abdul.aziz@unsoed.ac.id

Informasi Artikel

Diterima:
1 Oktober 2024

Disetujui:
2 Oktober 2024

Dipublikasikan:
29 Oktober 2024

Kata Kunci:
Korupsi,
Kemiskinan, IPM,,
Pengangguran,
Inflasi

Abstract

This study examines the impact of corruption on poverty in Indonesia during the period 2001–2021, while considering other macroeconomic variables such as the Human Development Index (HDI), unemployment, and inflation. Using secondary data, the research applies multiple linear regression. The results reveal that corruption has a positive and significant effect on poverty. Conversely, HDI has a negative and significant effect, showing that improved human development reduces poverty. Unemployment also shows a positive relationship with poverty, while inflation has a weaker but still positive impact. These findings underscore the importance of anti-corruption measures, investments in human capital, job creation policies, and inflation control to effectively reduce poverty in Indonesia.

Abstrak

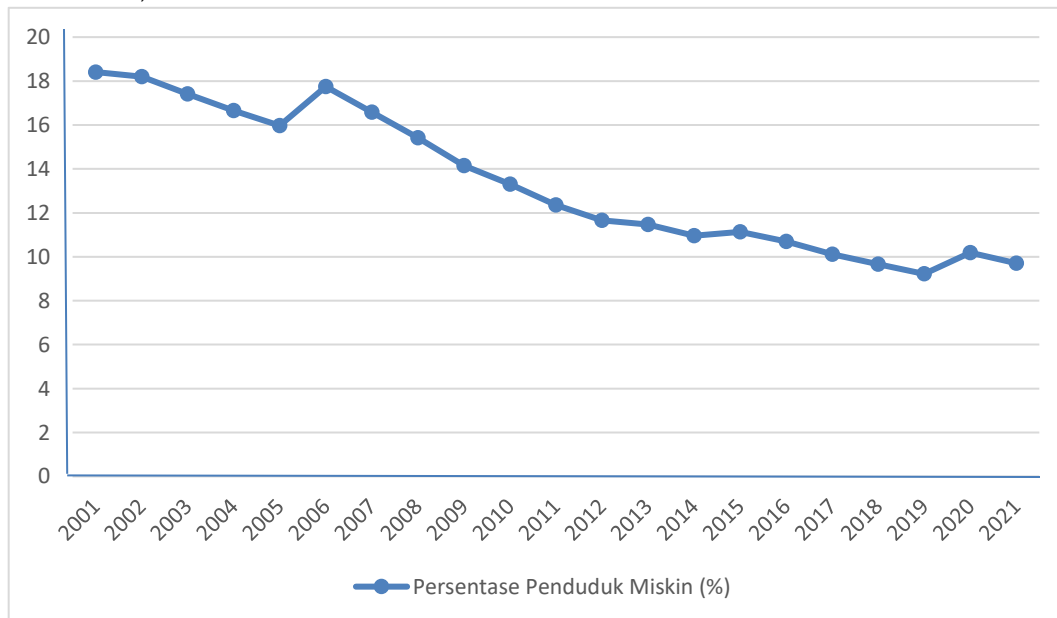
Penelitian ini menganalisis pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2001–2021, dengan mempertimbangkan variabel makroekonomi lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan inflasi. Menggunakan data sekunder, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara inflasi berpengaruh positif namun relatif lemah. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pemberantasan korupsi, investasi pada kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara memiliki masalah kemiskinan yang telah lama menjadi masalah nasional, dan sampai saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dampak dari kemiskinan ini adalah Indonesia masih menjadi negara berkembang dan pembangunan negara terhambat. Kemiskinan merupakan pusat perhatian pembangunan di setiap negara di dunia. Kekhawatiran tentang kemiskinan telah menjadi masalah global, yang diungkapkan langsung dalam *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs menetapkan tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan ekstrem pada tahun 2015. Tujuan ini menjadi acuan pembangunan nasional. Walaupun ini merupakan komitmen global, jelas bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak mudah karena kemiskinan itu kompleks (Pratama, 2014).

Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan dengan memakai *konsep basic needs approach*. Di mana konsep ini melihat kemiskinan sebagai ketidaksanggupan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan (Baktiar et al., 2020). Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar digunakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat, Pakistan, Bangladesh, Vietnam dan Gambia (Susanto dan Pangesti, 2020).

Pada awalnya MDGs menetapkan tahun 2015 sebagai tujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, namun PBB telah menentukan target kembali untuk menghapus segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030 melalui *Sustainable Development Goals* (SDG). Untuk memonitor garis kemiskinan dunia, pengukuran yang akan dilakukan harus dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia untuk mengukur kemiskinan menggunakan garis kemiskinan standar nasional yang digunakan oleh BPS, yaitu kategori penduduk yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem jika hidup di bawah garis kemiskinan dengan paritas daya beli sebesar Rp 486,168 per bulan. Jika dibandingkan, dengan menggunakan garis kemiskinan standar nasional, per kapitanya lebih tinggi dari standar internasional dengan paritas daya beli sebesar US\$1.90 per hari dan jika disetarakan dengan standar garis kemiskinan internasional, maka paritas daya beli sebesar US\$2.50 per hari (Hidayat et al., 2022).



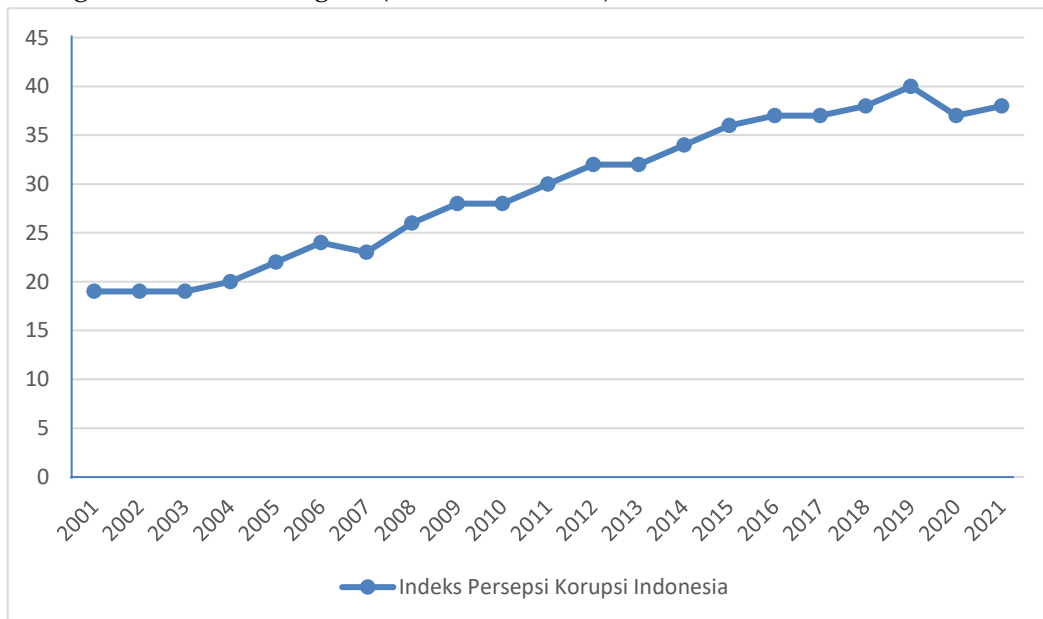
Sumber : BPS, 2022, data diolah

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional di Indonesia, 2001-2021.

Berdasarkan Gambar 1.1 yang terlihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2001-2021. Pada tahun 2001 hingga tahun 2005 terjadi penurunan hingga 2,44% dari 18,41% menjadi 15,97%, namun pada tahun 2006 terjadi peningkatan yaitu sebesar 1,78% dari 15,97% menjadi 17,75%. Berdasarkan laporan Tim Indonesia Bangkit, peningkatan kemiskinan pada tahun 2006 disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama adanya kenaikan harga yang tinggi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Oktober 2005. Yang kedua disebabkan adanya kegagalan program kompensasi pengurangan subsidi BBM untuk melindungi keluarga yang berstatus hampir miskin turun derajat menjadi semakin miskin. Dan yang terakhir penyebabnya adalah kegagalan pemerintah dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok (Supriyanto, 2006).

Peningkatan kembali pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 terjadi penurunan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, selain itu ada tiga faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan yaitu adanya pertumbuhan yang lambat dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga, terpuruknya sektor pariwisata, dan adanya kenaikan harga ecer pada komoditas pokok (Nasution, 2020). Salah satu penyebab lain kemiskinan pada Indonesia adalah maraknya kecurangan pemerintah. Korupsi diyakini menjadi pemicu atas kesulitan dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Adanya korupsi berarti anggaran yang semula dibelanjakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja menguap secara tidak bertanggung jawab dan memperburuk penderitaan masyarakat miskin (Khasanah, 2021).

Selama tahun 2001-2021, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2001 sebesar 18,41% menjadi 9,71% pada tahun 2021. Namun, pada periode yang sama, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan pada indeks persepsi korupsi Indonesia menjadikan peringkat negara Indonesia juga naik, yang semula pada tahun 2001 Indonesia menempati ranking ke 88 dari 180 negara. Namun pada tahun 2021, Indonesia berhasil naik 4 ranking menjadi ranking ke 96 dari 180 negara (World Bank, 2022).



Sumber : Transparency International, 2022, data diolah

Gambar 1.2. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, 2001-2021.

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari tahun 2001 hingga tahun 2021 IPK Indonesia terus mengalami

peningkatan. Selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2001-2003 IPK Indonesia berada pada skor 19, lalu tahun berikutnya mulai naik menjadi 20 pada tahun 2004, 22 pada tahun 2005, dan 24 pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007 skor IPK Indonesia sempat mengalami penurunan menjadi 23, lalu tahun 2008 hingga tahun 2010 mulai meningkat kembali.

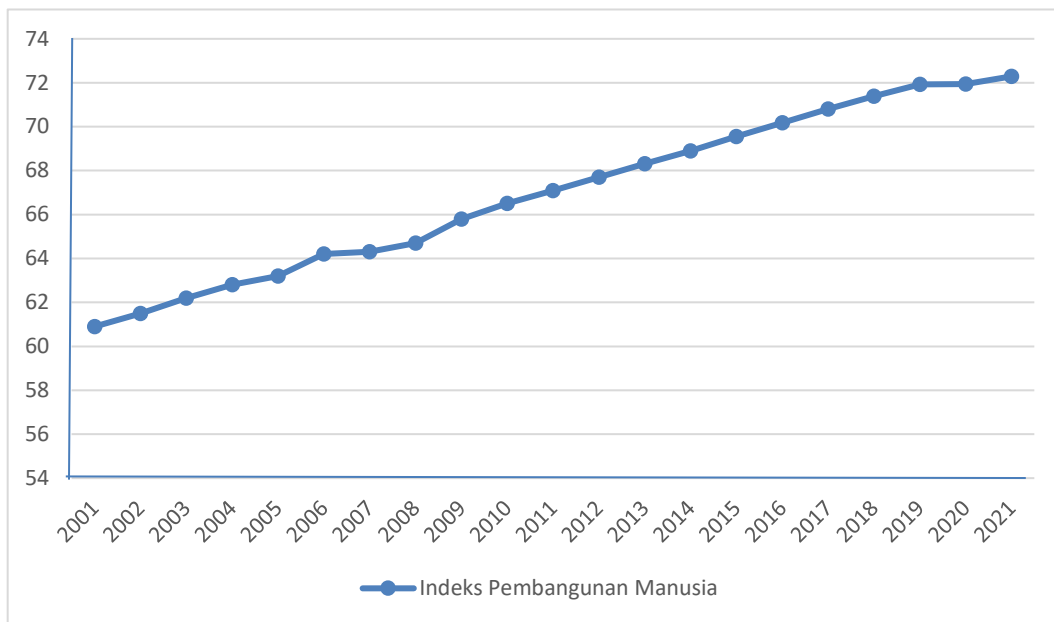
Lalu pada tahun 2011 IPK telah mencapai pada skor 30 an dan mengalami kenaikan yang cukup stabil mulai dari tahun 2014-2019, walaupun pada tahun 2020 skor IPK mengalami penurunan. Berdasarkan data *Transparency International* (TI) pada tahun 2015, nilai IPK Indonesia meningkat dua poin dari 34 pada tahun 2014 menjadi 36 pada tahun 2015, hal ini menjadikan Indonesia naik peringkat menjadi 15 dari sebelumnya peringkat 19 di kawasan Asia. Adapun pada tahun 2021 skor IPK Indonesia yaitu 38, di mana menjadikan Indonesia berada pada ranking 96 dari 180 negara.

Hasil empiris menemukan hubungan positif antara indeks persepsi korupsi dan kemiskinan di Indonesia. Hubungan positif ini lebih kuat dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang. Jadi, menurut penelitian sebelumnya, ada korelasi antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia (Haifa & Siregar, 2019).

Berbicara tentang korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, praktik ini sudah berlangsung lama, bahkan korupsi di Indonesia berkembang pesat, dan juga tergolong tinggi dari segi kuantitas (misalnya jumlah kerugian keuangan negara). Kualitas sistem korupsi menjadi semakin kompleks dan meluas ke semua lapisan masyarakat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak biasa karena tidak hanya merusak kehidupan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga mengancam kehidupan seluruh bangsa bahkan mempengaruhi generasi penerus bangsa (Shofiyah, 2019). Korupsi sendiri merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia dan menjadi penghalang keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, sehingga Indonesia akan terus menjadi negara yang berkembang jika kemiskinan tidak cepat diatasi. Pada sektor publik, korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan dapat memperdalam jurang kemiskinan. Hal ini dikarenakan ketika tingkat korupsi yang tinggi akan memperburuk kehidupan masyarakat miskin. Dengan adanya korupsi dapat menghambat program-program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan melalui pengorbanan pada proyek-proyek pemerintah dengan membuka kesempatan pada seseorang atau kelompok untuk mendapatkan pendapatan yang ilegal (Rashid & Nikopour, 2010).

Kata “Korupsi” dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai tindak kecurangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lainnya) demi keuntungan individu atau kelompok (Junaidi, 2018). Pada dasarnya korupsi berpengaruh langsung pada sejumlah faktor ekonomi dan pemerintahan, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Artinya, meningkatnya korupsi secara langsung mengurangi investasi ekonomi, menciptakan distorsi pasar, melemahkan persaingan, inefisiensi, dan ketimpangan pendapatan, mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan di suatu wilayah (Falah dan Suman, 2019).

Kemiskinan yang dialami seseorang tercermin dari kurangnya kepuasan terhadap kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). IPM mengukur tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup, pendidikan yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta standar hidup layak yang diukur dengan paritas daya beli dan pendapatan (Franciari & Sugiyanto, 2013). IPM adalah indikator kualitas pembangunan manusia, sehingga menjadikan IPM sebagai variabel penting bagi negara-negara untuk mengurangi kemiskinan. (Pratama, 2014).



Sumber: UNDP, 2022, data diolah

Gambar 1.3. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2001-2021.

Berdasarkan Gambar 1.3 skor Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia terus meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2021. Pada tahun 2001 hingga tahun 2006, skor IPM di Indonesia cukup meningkat yaitu sebesar 3,3 dari 60,9 menjadi 64,2. Namun pada tahun 2006 ke tahun 2007 peningkatan skor IPM hanya sebesar 0,01 dari 64,2 menjadi 64,3. Lalu pada tahun 2008 hingga tahun 2010 skor IPM terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 hingga tahun 2021, skor IPM telah meningkat hingga 5,2. Pada tahun 2021 peningkatan skor IPM meningkat secara merata di seluruh dimensi, baik itu pendidikan, standar hidup layak dan kesehatan.

Menurut penelitian Samputra dan Munandar (2019) faktor terpenting dalam menghapus kemiskinan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM berdampak negatif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian, efek pengentasan kemiskinan dari peningkatan IPM berbeda antara Sumatera dan Jawa-Bali dan pulau-pulau selain Sumatera dan Jawa-Bali.

Kemiskinan dapat dikurangi secara efektif dengan meningkatkan kualitas manusia melalui pembangunan berbasis pengembangan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kehidupan yang lebih bermartabat. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memajukan dan memastikan peningkatan kualitas warganya dengan baik. Inilah hakikat pembangunan seutuhnya yaitu dengan membangun bangsa Indonesia untuk kesejahteraan seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Selain korupsi, dan IPM menurut *World Bank* pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah pengangguran atau kurangnya lahan produktif sebagai aset yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka sehari-hari seperti makanan, air dan tempat tinggal (Zuhdiyaty dan Kaluge, 2018).

Pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara-negara berkembang. Pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang meluas dan distribusi pendapatan yang tidak merata saling berkaitan. Pekerja yang tidak bekerja penuh waktu atau hanya bekerja paruh waktu selalu termasuk dalam golongan sangat

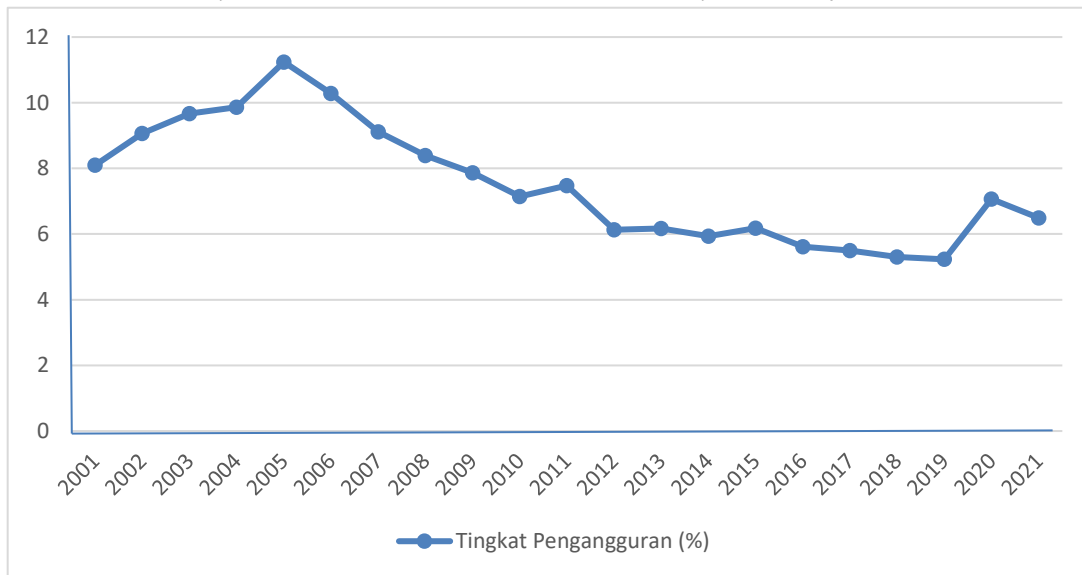
miskin. Pekerja berupah tetap di sektor publik dan swasta cenderung termasuk kelas menengah ke atas. Tetapi ini adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa orang yang menganggur itu miskin dan pekerja penuh waktu itu kaya.

Masyarakat miskin umumnya memiliki kesempatan kerja yang terbatas, kesempatan pengembangan usaha yang terbatas, perlindungan aset usaha yang lemah, ketimpangan upah yang lemah, dan perlindungan atas perempuan dan pekerja anak yang rentan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dan pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu mekanisme terpenting untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang adalah dengan memberikan upah dan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat miskin (Wiguna & Sakti, 2013).

Salah satu dari empat parameter baru yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah melakukan perbandingan antara angkatan kerja dan populasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang produktif dan layak dalam konteks untuk pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari strategi pembangunan internasional dan nasional.. Sasaran baru ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan bahwa pekerjaan yang memadai adalah jalan keluar dari kemiskinan yang berkesinambungan (International Labour Organization, 2008).

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pengangguran kedalam dua definisi, yaitu yang pertama adalah pengangguran terbuka yang meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu, penduduk yang bersedia bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Lalu yang kedua yaitu setengah pengangguran terpaksa, di mana yang termasuk dalam setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja menjadi buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang pada periode tertentu secara terdesak bekerja kurang dari jam normal dan masih mencari pekerjaan lain atau bersedia mencari pekerjaan lainnya (Disnaker Buleleng, 2019).



Sumber : BPS, 2022, data diolah

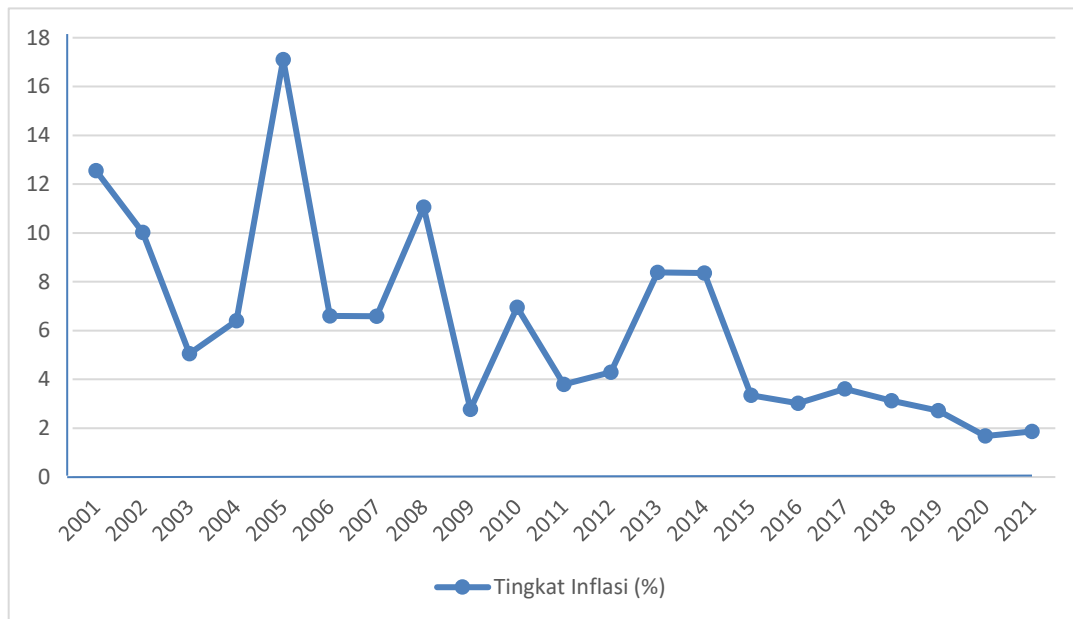
Gambar 1.4. Tingkat Pengangguran di Indonesia, 2001-2021

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 hingga tahun 2005, pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,14% dari 8,1% pada tahun 2001 menjadi 11,4% pada tahun 2005. Lalu pada tahun 2006 hingga tahun 2010 mengalami penurunan dari 10,28% menjadi 7,14%. Kemudian, antara tahun 2011 hingga tahun 2021, tingkat pengangguran di Indonesia berfluktuasi. Pada tahun 2011 hingga tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2,25%. Namun, akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,84% dari 5,23% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada

tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 tingkat pengangguran mengalami penurunan kembali.

Menurut penelitian Mahsunah (2013) pengangguran mempengaruhi kemiskinan. Artinya, jika tingkat pengangguran tinggi, begitu pula dengan kemiskinan. Dari sudut pandang ekonomi, pengangguran yang tinggi dapat mengurangi peluang produksi lokal, dan dari sudut pandang sosial, hal itu mencerminkan beban yang lebih besar pada masyarakat. Masyarakat akan perlahan-lahan terjerumus ke dalam kemiskinan.

Selain korupsi, IPM, dan pengangguran, disebutkan bahwa inflasi juga menjadi penyebab kemiskinan. Inflasi adalah kenaikan harga kebutuhan pokok rumah tangga secara terus menerus (Susanto & Pangesti, 2020). Namun menurut Boediono (2008) (dalam Febriaty dan Nurwani, 2017) menyebutkan bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut secara luas dan berdampak pada kenaikan dari sebagian besar dari harga barang lainnya.



Sumber : BPS, 2022, data diolah

Gambar 1.5. Tingkat Inflasi di Indonesia, 2001-2021

Pada Gambar 1.5 tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2001-2021 sangat berfluktuasi. Pada tahun 2001 hingga tahun 2003 mengalami penurunan dari 12,55% menjadi 5,06%, lalu pada tahun 2004 hingga tahun 2005 tingkat inflasi mengalami peningkatan dari 6,4% menjadi 17,11%. Selanjutnya pada tahun 2006, 2007, dan tahun 2009 tingkat inflasi mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2008 dan tahun 2010 tingkat inflasi mengalami peningkatan.

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,08% dari 4,3% pada tahun 2012 menjadi 8,38% pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2015 terjadi penurunan yaitu menjadi 3,35% dari 8,36% pada tahun 2014. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 tingkat inflasi terus mengalami penurunan dari 3,61% pada tahun 2017 menjadi 1,68% pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang tidak terlalu banyak yaitu dari 1,68% menjadi 1,87%.

Penyebab dari kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari individu masing-masing yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan faktor eksternal yang berasal dari luar yang diwakili oleh salah satunya yaitu inflasi (Dharmmayukti et al., 2021). Pengaruh inflasi bisa positif atau negatif bagi perekonomian suatu negara. Bank Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga, jika perekonomian negara sedang lesu (Ningsih & Andiny, 2018).

Salah satu tolok ukur perekonomian Indonesia adalah inflasi. Inflasi berkaitan dengan daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi, sehingga menjadikan inflasi sebagai indikator ekonomi yang penting. Laju inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ukuran garis kemiskinan, karena salah satu penentu tolok ukur dari garis kemiskinan adalah harga barang dan jasa. Maka dari itu kenaikan laju inflasi pasti diikuti oleh kenaikan ukuran garis kemiskinan (Hambarsari & Inggit, 2016).

Menurut penelitian Susanto dan Pangesti (2020) inflasi mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan. Artinya, ketika inflasi meningkat maka akan berdampak pada kenaikan biaya produksi sehingga harga barang dan jasa secara umum juga akan meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, ketika inflasi naik, begitu pula tingkat kemiskinan di Indonesia.

Bersumber pada latar belakang, dapat disebutkan bahwa korupsi menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan, di mana korupsi sendiri dapat menghambat pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan nasional di suatu negara. Dengan adanya korupsi maka alokasi dana yang ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan menjadi tidak efisien sehingga masyarakat miskin menjadi tidak bisa mengakses dan menerima dengan adil hak-hak nya dalam sektor publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat dinyatakan berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yaitu menurut penelitian Rashid dan Nikopour (2010) dalam hasil temuan empirisnya bahwa korupsi dan kemiskinan memiliki kausalitas dua arah. Oleh sebab itu, jika ingin mengurangi tingkat kemiskinan maka juga harus melakukan pemberantasan dalam korupsi secara serius. Dengan kata lain upaya pengentasan kemiskinan harus dibarengi dengan upaya pemberantasan korupsi, sehingga masyarakat miskin akan mendapatkan haknya kembali dalam sektor publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana IPM adalah representasi dari kemiskinan dan Indeks Persepsi Korupsi merupakan representasi dari korupsi. Menurut penelitian Baktiar, et all (2020) bahwa semakin tinggi nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah/ menurun. IPM sendiri adalah cerminan dari tingkat pembangunan kualitas manusia, di mana hal ini sangat penting bagi program untuk pengentasan kemiskinan di suatu negara. Salah satu cara suatu negara dapat terbebas dari kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak dari masyarakat itu sendiri. Menurut penelitian Pratama (2020) menyatakan bahwa variabel IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, dengan nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah untuk suatu negara/ wilayah. Hal ini juga selaras dengan penelitian Franciari dan Sugiyanto (2013) di mana IPM juga memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

Selain korupsi dan IPM, bahwa pengangguran juga menjadi salah satu pengaruh dari kemiskinan. Menurut penelitian Mahsunah (2013) dikatakan bahwa pengangguran mempengaruhi kemiskinan, jadi ketika tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Yang terakhir, inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut penelitian Rukmana (2012) menyatakan bahwa inflasi mempengaruhi kemiskinan, hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi yang tinggi maka akan mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan riil masyarakat terutama terhadap pendapatan para pekerja yang mempunyai pendapatan yang tetap sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan masyarakat perlahan-lahan akan terdorong ke dalam jurang kemiskinan.

Menurut peneliti bahwa variabel korupsi, IPM, pengangguran, dan inflasi dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal ini berlandaskan pada hasil penelitian terdahulu, dan sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurske di mana masyarakat di suatu negara atau daerah akan terus masuk dalam lingkaran setan kemiskinan ketika kualitas sumber daya manusianya

terbelakang yang dapat tercermin dari rendahnya IPM, serta memiliki modal yang kurang sehingga dapat menyebabkan produktivitas berkurang. Ketika produktivitasnya rendah, maka masyarakat akan menerima lebih sedikit pendapatan (hal ini tercermin dalam PDB per kapita yang rendah). Pendapatan yang rendah secara terus-menerus akan berdampak pada tabungan dan investasi yang lebih rendah. Pengangguran meningkat karena investasi yang lebih sedikit dan memperlambat penciptaan lapangan kerja. Lalu untuk inflasi hal ini sejalan dengan teori Boediono (2001) di mana inflasi dapat memberikan dampak pada penurunan nilai riil dari mata uang sehingga daya beli masyarakat menurun, karena ketika tingkat inflasi meningkat, maka masyarakat yang awal mulanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, namun dengan adanya inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa, dapat membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam jurang kemiskinan.

METODE ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan hasil analisis tersebut secara statistik dengan tujuan untuk menguji pengaruh antar-variabel yang telah dihipotesiskan (Sugiyono, 2012). Objek pada penelitian ini adalah korupsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, inflasi, dan kemiskinan di Indonesia.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Menurut Suliyanto (2018), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku yang bersangkutan pada penelitian. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Transparency International* (TI), *World Bank*, dan *United Nations Development Programme* (UNDP) serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti jurnal penelitian terdahulu, surat kabar online, buku, dan sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Data yang di gunakan merupakan data runtut waktu (*time series*) pada kurun waktu delapan belas tahun terakhir yaitu 2001 – 2021.

Model regresi yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen (bebas) disebut dengan regresi berganda (*multiple regression*). Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat/ *response* (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ *predictor* (X_1, X_2, \dots, X_n) diketahui dan untuk mencari tahu bagaimana arah dari hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independennya (Widarjono, 2009).

Persamaan pada model regresi berganda dengan variabel dependen yang dipengaruhi oleh dua atau lebih oleh variabel independen dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Y_t = Kemiskinan

β_0 = Intersep

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi

X_{1t} = Korupsi

X_{2t} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_{3t} = Pengangguran

X_{4t} = Inflasi

ε_t = Variabel gangguan

Dapat dijelaskan bahwa variabel dependennya adalah Y_t , dan variabel independennya adalah X_{1t} , X_{2t} , X_{3t} , X_{4t} . Lalu karena penelitian ini menggunakan data *time series* maka dari itu memakai subskrip t yang menyatakan waktu. Sementara untuk β_0 disebut sebagai intersep, sedangkan $\beta_{1,2,3,4}$ dalam regresi berganda disebut sebagai koefisien regresi parsial (Widarjono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Letak Geografis Indonesia



Sumber: Google Foto, 2022

Gambar 4.1. Letak Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai 37 provinsi dan terdapat lebih dari 17.000 pulau. Hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni di Indonesia. Jika dilihat dari sisi geografis, Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia, serta terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal tersebut membuat Indonesia berada pada kondisi silang, di mana hal ini sangat penting jika dihubungkan dengan perekonomian dan iklim Indonesia. Posisi Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia menjadi persimpangan jalur lalu lintas dunia, baik laut maupun udara (Konsulat Jenderal Republik Indonesia, 2022).

Di Indonesia terdapat lima pulau utama, yaitu Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selain pulau utama, Indonesia juga mempunyai pulau-pulau kecil yaitu Bali, Lombok, Karimunjawa, dan Gili. Di mana pulau-pulau kecil tersebut sering dijadikan tempat tujuan wisata para turis lokal maupun internasional. Indonesia memiliki ibukota negara yang terletak di Pulau Jawa, yaitu Jakarta (Konsulat Jenderal Republik Indonesia, 2022).

2. Gambaran Umum Indonesia

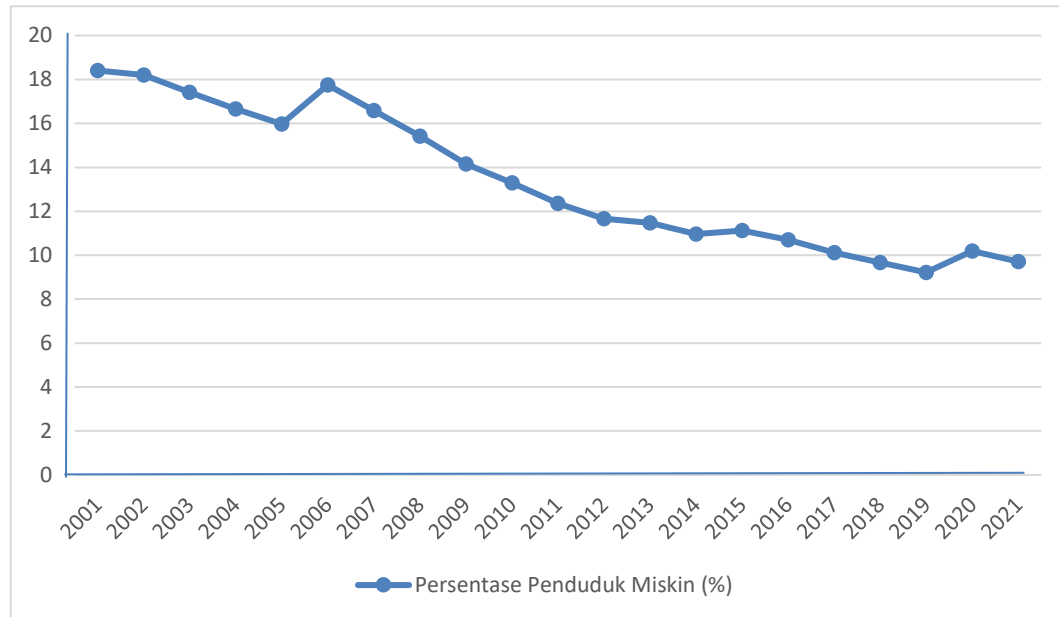
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 275 juta jiwa pada tahun 2022. Hal tersebut membuat Indonesia memperoleh peringkat ke-4 sebagai populasi terbesar di dunia dan sebagian populasi merupakan masyarakat dengan usia yang produktif, di mana Indonesia menjadi negara dengan sumber daya manusia yang bersaing (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2022).

Dari segi ekonomi, sejak tahun 2021 akhir sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, perekonomian dunia termasuk Indonesia mulai merangkak naik kembali. Di tengah adanya risiko pada pelemahan ekonomi global dan himpitan inflasi yang tinggi akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina, Badan Pusat Statistik mempublikasikan bahwa pada triwulan II tahun 2022 ekonomi

Indonesia meningkat dengan tinggi tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,44%. Selain angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, di sisi lain tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tengah risiko pelemahan ekonomi. Hal ini tercermin per Maret 2022, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan yaitu 9,54% yang pada sebelumnya yaitu September 2021 berada pada angka 9,71% (Bank Indonesia, 2022).

3. Gambaran Umum Variabel

a. Kemiskinan



Sumber: BPS, 2022, data diolah

Gambar 4.2. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional di Indonesia, 2001-2021.

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 hingga tahun 2021 menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia, namun pada tahun 2006 dan tahun 2020 mengalami peningkatan.

Perhitungan dalam penentuan persentase penduduk yang tergolong miskin didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang telah ditetapkan di Indonesia. Garis Kemiskinan (GK) adalah pengeluaran minimum dalam rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sebulan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan dan non pangan. Maka dari itu penduduk dapat dikategorikan sebagai orang miskin jika pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan yang berada di bawah garis kemiskinan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2001 hingga tahun 2005 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 2,44% dari 18,41% pada tahun 2001 menjadi 15,97% pada tahun 2005. Namun selang setahun dari 2005 yaitu pada tahun 2006 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 1,78% yaitu dari 15,97% pada tahun 2005 menjadi 17,75% pada tahun 2006. Penyebab terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 disebabkan oleh adanya inflasi umum sebesar 17,95% dari bulan Februari 2005 hingga Maret 2006, di mana ketika inflasi meningkat maka akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya garis kemiskinan nasional. Tinggi rendahnya persentase penduduk miskin sungguh dipengaruhi oleh garis kemiskinan.

Hal ini karena penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita yang rata-ratanya di

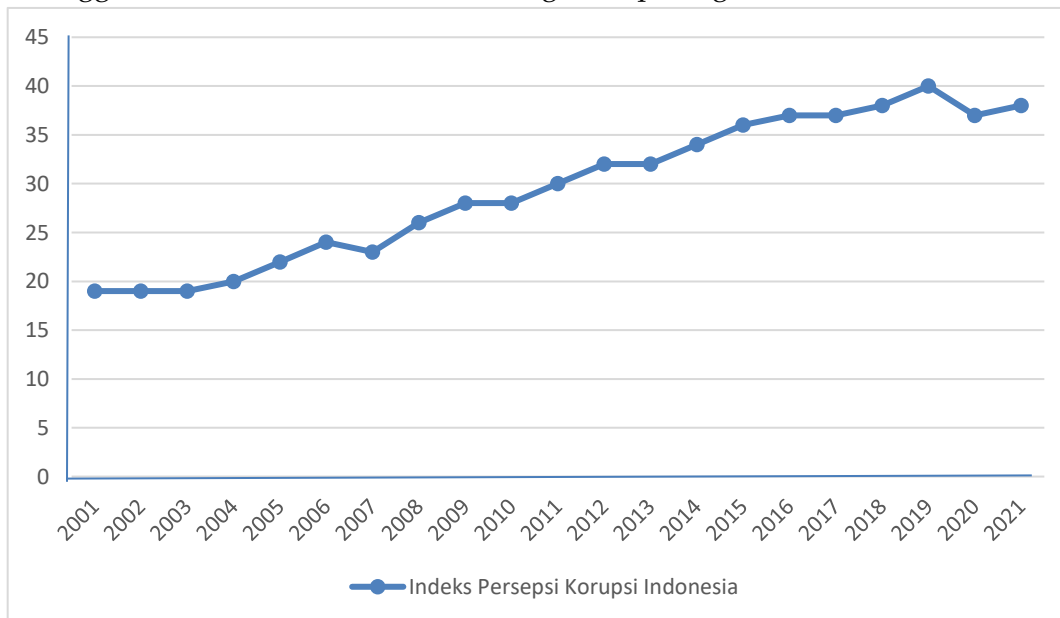
bawah garis kemiskinan di golongkan sebagai penduduk miskin. Maka dari itu jika penduduk yang tergolong penduduk miskin semakin banyak, hal itu dikarenakan garis kemiskinan nasional yang semakin tinggi. Pada bulan Februari 2005 hingga Maret 2006, garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 18,39%, yaitu sejumlah Rp129.108 per kapita per bulannya pada Februari 2005. Lalu pada Maret 2006, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp152.847 per kapita per bulan (BPS, 2006).

Setelah terjadinya peningkatan pada tahun 2006, persentase penduduk miskin mengalami penurunan kembali pada tahun 2007 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 5,92% dari 16,58% pada tahun 2007 menjadi 10,96% pada tahun 2014. Selang setahun pada tahun 2015 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena banyaknya pengangguran. Pengangguran yang terjadi pada tahun 2015 silam akibat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga penyerapan angkatan kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja menjadi terhambat dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran, selain pengangguran tingkat inflasi juga menjadi penyebab dari kenaikan persentase penduduk miskin itu sendiri (Listiyarini, 2016).

Lalu pada tahun 2020 persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya pandemik Covid-19. Selain itu ada tiga faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan persentase penduduk miskin yaitu lambatnya pertumbuhan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga, terpuruknya industri pariwisata, dan adanya kenaikan harga eceran pada bahan pokok (Nasution, 2020). Seperti pada tahun 2006, kenaikan harga ecer bahan pokok menyebabkan inflasi sehingga akan berpengaruh pada kenaikan garis kemiskinan nasional di mana pada bulan Maret 2020 garis kemiskinan nasional Indonesia mencapai Rp458.947 per kapita per bulan (Timorria, 2021).

b. Korupsi

Berdasarkan Gambar 4.3 pada tahun 2001 hingga tahun 2021 dapat dilihat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami peningkatan. Selama tiga tahun berturut-turut skor indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki skor yang sama yaitu sebesar 19. Lalu pada tahun 2004 hingga tahun 2006 skor IPK mulai meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2007 skor IPK mengalami penurunan dari skor 24 pada tahun 2006 menjadi skor 23 di tahun 2007. Selanjutnya untuk tahun 2008 hingga tahun 2010 skor IPK mulai mengalami peningkatan kembali.



Sumber: Transparency International, 2022, data diolah

Gambar 4.3. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, 2001-2021.

Menurut *Transparency International* Indonesia (2007) menyatakan bahwa penyebab terjadinya penurunan skor IPK pada tahun 2007 disebabkan oleh penurunan kualitas pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal ini karena pada tahun 2007 masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan masih banyaknya para pelaku korupsi yang bebas dari pidana hukum. Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2007, yaitu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi Hilton oleh Pontjo Sutowo dan Ali Mazi namun keduanya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya kasus korupsi dana bantuan gubernur yang ditujukan untuk proyek air bersih sebesar Rp800.000.000. Sama seperti kasus sebelumnya pada kasus korupsi ini terdakwa yaitu Supito mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Negeri Blora. Beberapa kasus inilah yang menyebabkan skor IPK turun karena para responden dalam mengisi survey merasa ragu terhadap upaya yang dilakukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

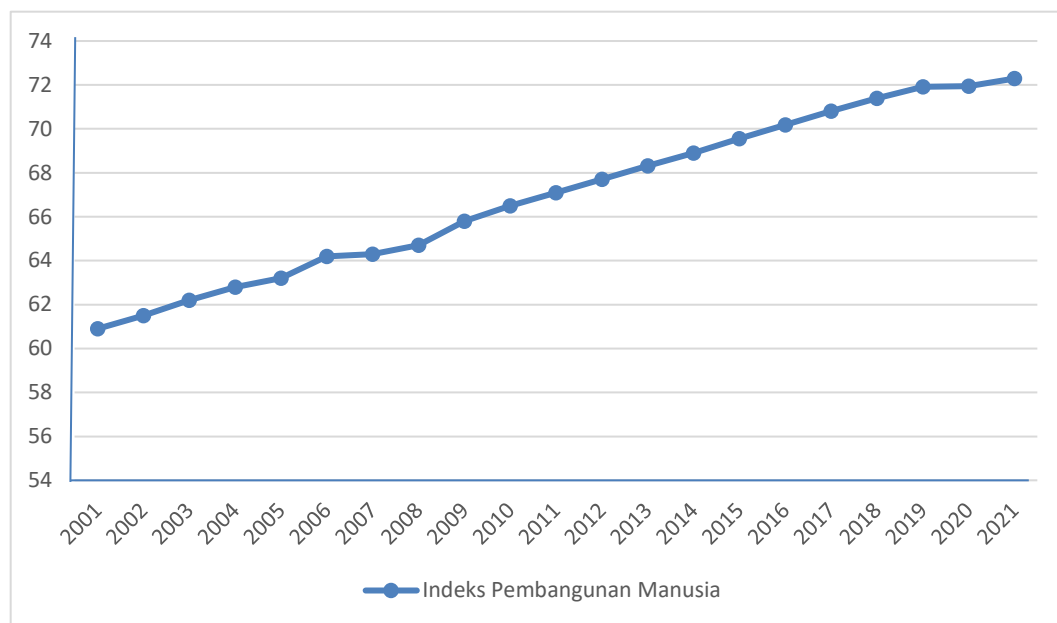
Selanjutnya pada tahun 2008 hingga tahun 2019 skor IPK Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 skor IPK Indonesia mengalami penurunan sebesar 3 skor yaitu dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 skor IPK kembali mengalami peningkatan. Sama seperti tahun 2007, menurut *Transparency International* Indonesia (2020) penyebab turunnya skor IPK pada tahun 2020 karena masih adanya kasus korupsi yang terjadi terutama kasus korupsi politik di masa pandemi Covid-19 yang melibatkan para anggota politikus yang mempunyai jabatan publik. Penyebab lainnya adalah arahan pemerintah yang tidak jelas dalam merumuskan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Selain itu koordinator ICW (*Indonesian Corruption Watch*) yaitu Adnan Topan Husodo menyoroti pada tahun 2020 pemerintah lebih fokus pada UU Cipta Kerja demi kepentingan elit dalam konteks investasi ekonomi dan mengabaikan undang-undang yang melengkapi upaya anti-korupsi yang lebih kuat. Misalnya, peninjauan kembali Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai yang seharusnya diprioritaskan. Akan tetapi peraturan penting ini hanya digantung tanpa diskusi lanjut oleh pemerintah.

Hal yang menjadi penyebab turunnya skor IPK ini masih harus menjadi perhatian pemerintah untuk menangani kasus tersebut dan perlu adanya peningkatan terhadap tanggungjawab anggota politik secara serius sehingga dapat terbebas dari tujuan untuk memperkaya atau kepentingan pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Gambar 4.4 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2001 hingga tahun 2021 peningkatan skor IPM sebesar 11,39 dari skor 60,9 pada tahun 2001 menjadi skor 71,29 pada tahun 2021. Peningkatan IPM dapat berjalan seiring dengan perbaikan pada kinerja ekonomi yang langsung berpengaruh baik pada indeks konsumsi riil per kapita yang disesuaikan.

Pada tahun 2001 hingga tahun 2010 perhitungan IPM masih dengan perhitungan lama, di mana indikator angka melek huruf masih dipakai dalam perhitungan indeks pendidikan, lalu indikator PDB per kapita juga masih digunakan dalam menghitung indeks standar hidup layak. Lalu pada tahun 2010 hingga tahun 2021 rumus perhitungan IPM menggunakan rumus baru. Ada beberapa indikator yang diubah pada rumus baru ini, di mana indikator angka melek huruf diubah menjadi angka harapan lama sekolah, lalu indikator PDB per kapita diubah menjadi PNB per kapita. Diubahnya indikator tersebut menurut BPS karena sudah tidak berkaitan lagi untuk mengukur pendidikan secara menyeluruh karena dianggap tidak dapat mencerminkan mutu pendidikan. Lalu untuk PDB per kapita juga diubah karena tidak mencerminkan penghasilan penduduk di suatu wilayah.



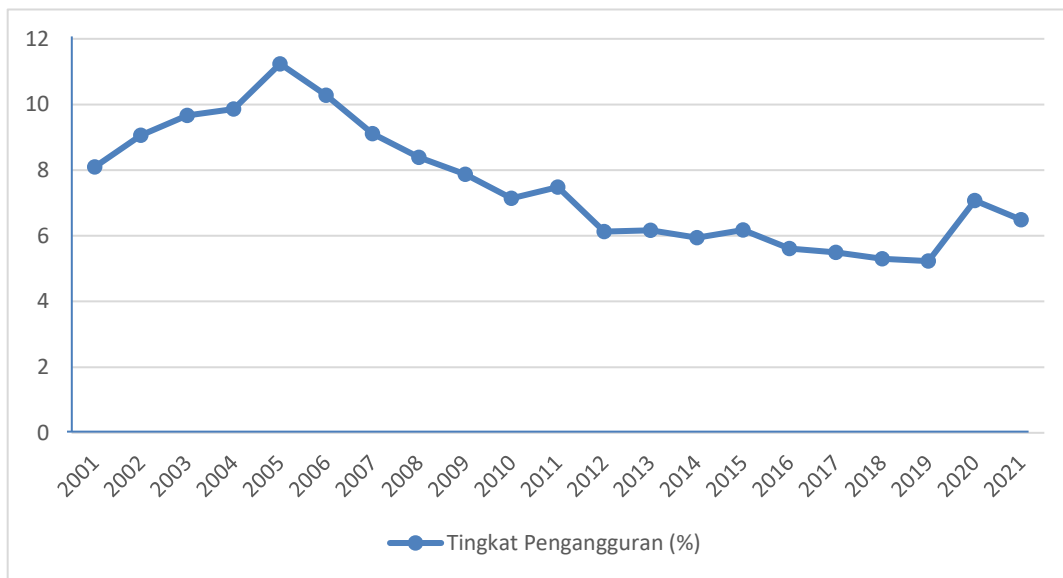
Sumber: UNDP, 2022, data diolah

Gambar 4.4. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2001-2021.

Skor IPM di Indonesia pada tahun 2021 merupakan skor tertinggi di mana skor IPM Indonesia mencapai angka 72,29. Skor 72,29 mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Indonesia berada dalam kategori yang tinggi. Peningkatan IPM tertinggi yang terjadi pada tahun 2021 terjadi di semua aspek, di mana aspek standar hidup layak yang diukur bersumber dari pengeluaran rata-rata riil per kapita per tahun yang naik sebesar 1,30% yaitu menjadi Rp 11,15 juta. Lalu aspek pendidikan yang diukur melalui usia harapan lama sekolah masyarakat pada umur 7 tahun naik sebesar 0,77%, selanjutnya rata-rata lama sekolah masyarakat pada umur 25 tahun ke atas naik sebesar 0,7%. Dan yang terakhir yaitu aspek usia harapan hidup naik sebesar 0,13% (Dihni, 2021).

d. Pengangguran

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat bahwa pada tahun 2001 hingga tahun 2021 tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2001 hingga tahun 2005 tingkat pengangguran di Indonesia terlihat terus meningkat. Persentase tingkat pengangguran tertinggi yaitu pada tahun 2005 di mana pada tahun tersebut persentase tingkat pengangguran mencapai angka 11,24%. Peningkatan yang terjadi sebesar 1,38% dari 9,86% pada tahun 2004 menjadi 11,24% pada tahun 2005.



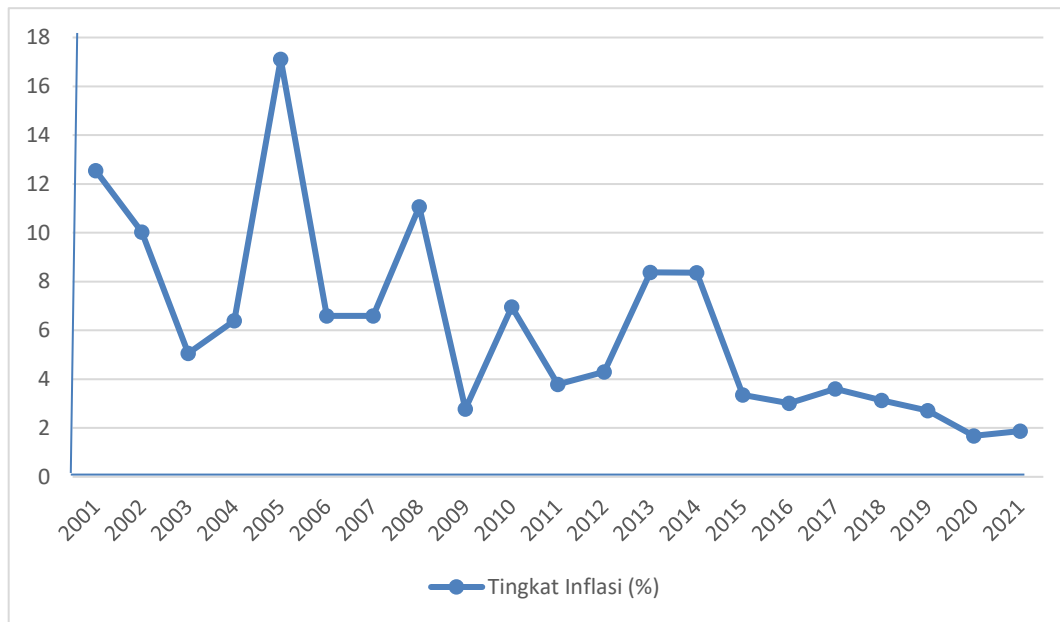
Sumber: BPS, 2022, data diolah

Gambar 4.5. Tingkat Pengangguran di Indonesia, 2001-2021.

Penyebab dari meningkatnya tingkat pengangguran pada tahun 2001 hingga tahun 2005 diakibatkan karena masih banyak angkatan kerja yang belum terserap dengan baik, di mana hal ini tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Lalu mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2010 tingkat pengangguran mulai menurun sebesar 3,14% dari 10,28% pada tahun 2006 menjadi 7,14% pada tahun 2010 hal ini disebabkan karena adanya penambahan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan tenaga kerja dengan lebih baik. Lalu pada tahun 2011 tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,34%. Selang setahun pada tahun 2012 hingga tahun 2014 tingkat pengangguran kembali mengalami penurunan sebesar 0,19%, namun pada tahun 2015 tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Selanjutnya pada tahun 2016 hingga tahun 2019 tingkat pengangguran mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang drastis. Tingkat pengangguran dari tahun 2019 meningkat sebesar 1,84% dari 5,23% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 tingkat pengangguran menurun sebesar 0,58%.

Penyebab persentase tingkat pengangguran tinggi pada tahun 2020 yaitu akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak dari adanya Covid-19 sangat merugikan masyarakat bahkan negara. Di mana ketika pandemi Covid-19 terjadi banyak perusahaan yang melakukan PHK karyawannya karena banyak perusahaan yang tutup dan tidak mampu membayar biaya operasionalnya, selain itu adanya peraturan pemerintah yaitu berupa *lockdown* dan PSBB menyebabkan banyaknya UMKM yang terpaksa tutup sehingga hal tersebut menjadi tingkat pengangguran meningkat secara drastis (Fahri et al., 2020).

e. Inflasi



Sumber: BPS, 2022, data diolah

Gambar 4.6. Tingkat Inflasi di Indonesia, 2001-2021.

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2010 mengalami fluktuasi. Di mana dapat dilihat bahwa tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai angka sebesar 17,11%. Lalu tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yang mencapai angka sebesar 2,78%.

Pada tahun 2005 penyebab terbesar terjadinya inflasi adalah adanya peningkatan harga BBM per 1 Oktober yang menyokong inflasi sebanyak 3,47%. Lalu ada peningkatan biaya transportasi luar kota dan dalam kota sebanyak 2,08%. Selain adanya peningkatan pada harga BBM, penyebab inflasi tinggi pada tahun 2005 adalah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang lebaran (Afriyadi, 2015). Selanjutnya pada tahun 2009 tingkat inflasi dapat mencapai angka 2,78%, hal ini karena pada tahun 2009 angka posisi cadangan devisa negara menempati posisi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia yaitu sebesar 65 miliar dolar AS. Selain itu nilai tukar rupiah pada tahun 2009 juga mengalami apresiasi sebesar 15% dan tercatat bahwa nilai tukar rupiah terbilang tinggi di wilayah Asia (Wisnu, 2010).

Lalu pada tahun 2010 inflasi mengalami peningkatan sebesar 4,18%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), secara keseluruhan, inflasi tahun 2010 dipengaruhi oleh harga beras, dengan inflasi sebesar 1,29%, harga listrik sebesar 0,36%, harga cabai merah sebesar 0,32%, emas perhiasan sebesar 0,27% dan bawang merah sebesar 6,96% sebesar 0,25% (Bambang, 2011). Tiga tahun berikutnya tingkat inflasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014, di mana pada tahun 2013 tingkat inflasi mencapai angka sebesar 8,38% dan tahun 2014 mencapai angka sebesar 8,36%. Penyebab dari tingginya tingkat inflasi pada tahun 2013 dan tahun 2014 disebabkan oleh meningkatnya harga BBM bersubsidi di mana bensin premium meningkat menjadi Rp6.500/liter dan solar meningkat menjadi Rp5.500/liter. Selain karena kenaikan harga BBM, kenaikan harga pada beberapa komoditas lain seperti biaya listrik dan biaya transportasi udara juga menyumbang tingginya tingkat inflasi di Indonesia (Jefriando, 2014).

Lalu pada tahun 2020, angka inflasi mencapai angka terendah yaitu sebesar 1,68%. Penyebab rendahnya tingkat inflasi tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan yang terjadi dampak dari turunnya kegiatan ekonomi akibat adanya PSBB untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia dan penyebab lainnya adalah adanya penurunan dari daya beli masyarakat karena

masyarakat lebih memilih untuk menabung daripada membelanjakan uangnya dan alasan masyarakat lebih memilih menabung karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan PHK besar-besaran yang terjadi selama pandemi Covid-19 berlangsung (Setiaji, 2020).

Pada tahun 2021 tingkat inflasi tidak terlalu meningkat secara signifikan dan bisa dikatakan tingkat inflasi masih tetap rendah dan stabil. Hal ini disebabkan karena belum kuatnya permintaan domestik yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, selain itu belum memadainya pasokan dan yang terakhir adalah keberhasilan kebijakan BI serta pemerintah kota dan daerah dalam menjaga stabilitas harga di Indonesia (Bank Indonesia, 2022).

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data awal sebanyak 21, ditemukan adanya data *outlier* multivariat yang menyebabkan terjadinya multikolinieritas. Data *outlier* multivariat adalah data *outlier* yang disebabkan oleh variabel independen. Jika ada satu atau lebih dari variabel independen memiliki nilai yang ekstrim maka *outlier* multivariat dapat terjadi. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut peneliti mengeluarkan data *outlier* dan menggunakan model distribusi lag (*Distributed lag model*) dengan waktu selang satu tahun. Setelah melakukan tahapan pengeluaran data *outlier*, data awal sebanyak 21 menjadi 20. Selain mengeluarkan data outlier pada periode t, peneliti juga mengeluarkan variabel IPM (X2) dari model regresi untuk memperbaiki terdeteksinya multikolinieritas pada hasil analisis data. Selain itu pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji signifikansi 10% bukan 5%. Karena untuk mendapatkan variabel yang signifikan, jika menggunakan 5% maka terdapat variabel yang tidak signifikan karena p-value nya > 0,05 sehingga hasilnya menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu peneliti lebih memilih uji signifikansi sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi, nilai residual yang sudah distandarisasi terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan uji normalitas dengan Jarque-Bera (JB Test). Jika hasil nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

Jarque Bera	0,9023
Nilai Probabilitas	0,6368

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas setelah variabel IPM dikeluarkan dari model regresi. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa nilai probabilitas Jarque Bera sebesar 0,6368. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Gujarati (2004) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independennya atau tidak. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen terdapat multikolinieritas, dan jika nilai VIF nya lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Centered VIF
C	NA
CPI(-1)	4,9369
UNE(-1)	4,4938
INF(-1)	1,6850

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Berikut adalah tabel hasil uji multikolinieritas setelah variabel IPM dikeluarkan dari model regresi. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa nilai VIF pada CPI(-1) sebesar 4,9369 atau lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel CPI tidak terdapat gejala multikolinieritas. Nilai VIF pada UNE(-1) sebesar 4,4938 atau lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel UNE tidak terdapat gejala multikolinieritas. Nilai VIF pada INF(-1) sebesar 1,6850 atau lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel INF tidak terdapat gejala multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi setelah mengeluarkan variabel IPM menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinieritas, hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF setiap variabel independen lebih kecil dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah masalah terhadap asumsi dari kesamaan varian (homoskedastisitas), yang merupakan varian eror bernilai sama untuk setiap kombinasi yang tetap. Masalah dari heteroskedastisitas sendiri timbul jika variabel gangguan mempunyai varian yang tidak sama (Gujarati, 2004). Pada pengujian ini menggunakan uji Glejser, di mana dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	hitung	p
CPI(-1)	501	0,586
UNE(-1)	7937	0,390
INF(-1)	1119	0,156

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas setelah variabel IPM dikeluarkan dari model regresi. Dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa variabel CPI(-1), UNE(-1), INF(-1) memiliki nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi kedua ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota dari sekumpulan data *time series* (data yang diurut berdasarkan waktu) (Gujarati, 2004). Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan metode *Breusch-Godfrey* (B-GTest).

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0,1369	Prob. F	0,8732
Obs*R-squared	0,3836	Prob. Chi-Square	0,8255

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas setelah variabel IPM dikeluarkan dari model regresi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada model regresi kedua dapat dilihat bahwa pada tabel 4.4 nilai probabilitas dari nilai Obs^*R -squarednya menunjukkan hasil sebesar 0,8255, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi kedua juga dapat dinyatakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan independen ketika nilai variabel independen diketahui (Widarjono, 2009). Pada penelitian ini menggunakan *distributed lag model* dengan mengurangi data pada satu tahun sebelumnya. Karena pada variabel independen memiliki data outlier multivariat, maka peneliti mengambil langkah untuk menghilangkan data outlier. Data pertama berjumlah sebanyak 21, setelah dikurangi selama satu tahun data menjadi sejumlah 20. Selain menghilangkan data outlier untuk periode t, peneliti juga mengeluarkan variabel IPM (X2). Hal ini dikarenakan variabel IPM menyebabkan adanya korelasi dengan variabel bebas lainnya yaitu CPI/korupsi (X1).

Pada penelitian ini menggunakan data *time series* dari tahun 2001-2021. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kemiskinan sebagai variabel dependen. Lalu untuk variabel independennya menggunakan variabel korupsi, pengangguran dan inflasi yang menggunakan lag satu tahun sebelumnya.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	efisien β	t.Error	Value
	-11,0049	0,698	0,006
I(-1)	0,2913	0,536	0,001
NE(-1)	0,3650	0,012	0,885
F(-1)	0,1103	0,572	0,717

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien β adalah bentuk dari suatu persamaan regresi yang menggunakan data *time series* pada model regresi berganda yang tidak hanya mencakup nilai saat ini pada variabel independen (X), tetapi juga mencakup nilai masa lalu (*lag*) atau disebut dengan *distributed lag model*. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

$$\hat{POV}_t = -11,0049 + 0,2913CPI_{t-1} + 0,3650 UNE_{t-1} + 0,1103 INF_{t-1}$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut adalah persamaan koefisien regresi dengan *distributed lag model* yang dapat disimpulkan di bawah ini:

a. Korupsi

Nilai koefisien untuk variabel CPI(t-1) (korupsi) adalah sebesar 0,2913. Nilai tersebut menyatakan pengaruh positif, yang berarti apabila korupsi pada tahun lalu meningkat sebesar 1 skor maka rata-rata kemiskinan pada tahun sekarang akan mengalami peningkatan sebesar 0,2913 persen. Dengan menggunakan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

b. Pengangguran

Nilai koefisien untuk variabel $UNE(t-1)$ (pengangguran) adalah sebesar 0,3650. Nilai tersebut menyatakan pengaruh positif, yang berarti apabila pengangguran pada tahun lalu meningkat sebesar 1 persen maka rata-rata kemiskinan pada tahun sekarang akan mengalami peningkatan sebesar 0,3650 persen. Dengan menggunakan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

c. Inflasi

Nilai koefisien untuk variabel $INF(t-1)$ (inflasi) adalah sebesar 0,1103. Nilai tersebut menyatakan pengaruh positif, yang berarti apabila inflasi pada tahun lalu meningkat sebesar 1 persen, maka rata-rata kemiskinan pada tahun sekarang akan mengalami peningkatan sebesar 0,1103 persen. Dengan menggunakan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

3. Menghitung Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menyatakan proporsi dari variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (X). Nilai R^2 terletak di antara 0 dan 1. Ketika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independen untuk menerangkan variabel dependennya mengalami keterbatasan.

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

squared	0,9490
Adjusted R-squared	0,9395

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat dilihat bahwa nilai R-squared pada model regresi kedua sebesar 0,9490 menyatakan bahwa variabel $CPI(-1)$ (korupsi), $UNE(-1)$ (pengangguran), dan $INF(-1)$ (inflasi) mempunyai pengaruh sebesar 94,9% terhadap kemiskinan dan sisanya sebesar 5,1% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya di luar variabel korupsi, pengangguran dan inflasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa pada tabel 4.7 nilai F-statistik sebesar 99,383. Jika dibandingkan dengan F tabel, di mana untuk mengetahui nilai F tabel menggunakan rumus yaitu $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$. Di mana k adalah jumlah keseluruhan variabel (variabel dependen + variabel independen), dan n adalah jumlah observasi dengan $\alpha = 0,10$ atau 10%. Dari rumus tersebut dapat diketahui $df1 = 4-1 = 3$, dan $df2 = 20-4 = 16$. Sehingga dapat diketahui F tabelnya adalah sebesar 2,46 yang artinya F hitung > F tabel. Selain itu dapat dilihat dari nilai *p-value*, nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel korupsi, pengangguran, dan inflasi mempengaruhi variabel kemiskinan secara signifikan.

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F

t-statistik	,383
Prob (F-statistik)	,000

Sumber : Data Sekunder, 2022 (diolah dengan Eviews 9) a. Uji Statistik t

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t

Variabel	t-statistik	P-value
CPI(-1)**	5,4316	0,0001
UNE(-1)*	1,8137	0,0885
INF(-1)*	1,9290	0,0717

Sumber : Data Sekunder, 2022, diolah dengan Eviews 9

Keterangan:

*** Signifikan pada $\alpha = 1\%$

** Signifikan pada $\alpha = 5\%$

* Signifikan pada $\alpha = 10\%$

Berdasarkan tabel 4.8 dari hasil model regresi pengaruh korupsi, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia diperoleh nilai t hitung variabel korupsi sebesar 5,4316, variabel pengangguran sebesar 1,8137, dan variabel inflasi sebesar 1,9290. Dengan df sebesar 16 pada tahap signifikan 0,10. Sehingga didapat nilai t tabel sebesar 1,7458. Dari hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Pada variabel CPI(-1) (korupsi) hasil regresi menunjukkan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar 5,4316 dan nilai t tabel sebesar 1,7458. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dibuktikan karena nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai $p\text{-value} < 0,05$. Oleh karena itu, menurut hipotesis yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, **diterima**.
- 2). Pada variabel UNE(-1) (pengangguran) hasil regresi menunjukkan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar 1,8137 dan nilai t tabel sebesar 1,7458. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dibuktikan karena nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai $p\text{-value} < 0,10$. Oleh karena itu, menurut hipotesis yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, **diterima**.
- 3). Pada variabel INF(-1) (inflasi) hasil regresi menunjukkan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar 1,9290 dan nilai t tabel sebesar 1,7458. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dibuktikan karena nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai $p\text{-value} < 0,10$. Oleh karena itu, menurut hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, **diterima**.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Korupsi Terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini memiliki hasil analisis yang menunjukkan bahwa korupsi berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi korupsi maka akan semakin tinggi juga kemiskinan di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan penelitian Gumala dan Anis (2019), Haifa dan Siregar (2019), dan Samputra dan Munandar (2019) yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh signifikan pada kemiskinan, akan tetapi pada penelitian ini membutuhkan waktu lag satu tahun untuk berpengaruh sehingga pengaruhnya tidak sesaat atau memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang panjang.

Korupsi merupakan tindak kejahatan tidak bisa di remehkan, karena korupsi tidak hanya akan merusak kehidupan masyarakat dan juga perekonomian, namun juga akan mengancam kehidupan

seluruh bangsa bahkan mempengaruhi generasi penerus bangsa (Shofiyah, 2019). Pasalnya korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang menyalahgunakan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan untuk pribadi atau kelompok dan dengan adanya korupsi menjadi penghalang bagi program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara signifikan yang mengacu pada salah satu isi dari *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* (Baktiar et al., 2020). Selain itu dengan adanya korupsi berarti terjadi penyelewengan terhadap alokasi dana yang sudah direncanakan, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan pada ketidakefisienan dalam pengalokasian dana tersebut dan program atau proyek-proyek publik akan mengalami keterhambatan. Hal inilah yang membuat investor tidak tertarik atau bahkan akan mencabut dana investasinya yang semula bertujuan untuk melakukan investasi pada negara tersebut. Sehingga dengan rendahnya investasi maka penyediaan lapangan pekerjaan akan menurun, dan akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Dengan adanya pengangguran maka kemiskinan akan meningkat (Haifa dan Siregar, 2019).

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini memiliki hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan semakin tinggi juga kemiskinan di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan penelitian Fahrika, Salam dan Buhasyim (2020), Wiguna dan Sakti (2019), dan Mahsunah (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, akan tetapi pada penelitian ini membutuhkan waktu lag satu tahun untuk berpengaruh sehingga pengaruhnya tidak sesaat atau memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Mankiw et al (2012) pengangguran adalah seseorang yang sedang tidak bekerja untuk sementara waktu atau yang sedang mencari pekerjaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurske di mana masyarakat di suatu negara atau daerah akan terus masuk dalam lingkaran setan kemiskinan ketika memiliki kualitas sumber daya manusianya yang rendah, serta memiliki modal yang kurang sehingga akan menimbulkan kurangnya produktivitas. Ketika produktivitas di suatu daerah atau negara rendah, maka masyarakatnya akan menerima pendapatan yang rendah. Lalu dengan menerima pendapatan yang rendah maka akan berdampak pada rendahnya tabungan dan juga investasi. Rendahnya segi investasi akan memperlambat proses untuk penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga hal ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran di masyarakat akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan meningkatnya tingkat pengangguran secara perlahan masyarakat akan terdorong kedalam jurang kemiskinan. Hal ini dikarenakan apabila pengangguran meningkat maka pendapatan masyarakat akan menurun sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan kemiskinan akan meningkat (Wiguna dan Sakti, 2019).

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini memiliki hasil analisis yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi juga kemiskinan di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ningsih dan Andiny (2018), Taklukdar (2018) dan Primandari (2018) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, akan tetapi pada penelitian ini membutuhkan waktu lag satu tahun untuk berpengaruh sehingga pengaruhnya tidak sesaat atau memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang panjang.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hambarsari dan Inggit (2016) serta Susanto dan Pangesti (2020) yang menyatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan ketika inflasi sedang berlangsung maka pemerintah akan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat berupa operasi pasar murah yang akan membantu masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga murah selain itu masyarakat miskin juga mendapat bantuan berupa beras raskin sehingga kemiskinan tidak akan mengalami peningkatan.

Walaupun hasil penelitian ini bertentangan dengan dua penelitian terdahulu, namun menurut teori Boediono (2001) menyatakan bahwa inflasi merupakan meningkatnya harga secara terus-menerus, dan meningkatnya tidak hanya terjadi pada harga satu atau dua barang namun secara keseluruhan dan dapat menimbulkan harga lain juga ikut meningkat. Inflasi memberikan dampak terhadap penurunan nilai riil dari mata uang sehingga dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini dikarenakan ketika inflasi meningkat, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga ketika masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka akan mendorong masyarakat itu sendiri kedalam jurang kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel korupsi yang menggunakan waktu lag satu tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang berarti bahwa, ketika korupsi meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat di Indonesia.
2. Variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dikeluarkan dari model karena variabel IPM memberikan dampak multikolinieritas yang membuat model menjadi tidak FIT
3. Variabel pengangguran yang menggunakan waktu lag satu tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang berarti bahwa, ketika pengangguran meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat di Indonesia.
4. Variabel inflasi yang menggunakan waktu lag satu tahun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang berarti bahwa, ketika inflasi meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A. D. (2015, 13 Mei). *Harga BBM dan Pangan Menjadi Penyebab Infasi RI Tinggi*. *Liputan6 Online*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2231587/harga-bbm-dan-pangan-jadi-penyebab-inflasi-ri-tinggi>
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Indonesia Dalam Angka Tahun 2019*. Indonesia: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin Bulan Maret 2006 Sebesar 39,05 Juta (No. 47/IX/1 September 2006)*. Jakarta, DKI:Penulis. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2006/09/01/475/jumlah-penduduk-miskin--bulan-maret-2006-sebesar-39-05-juta.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Konsep Garis Kemiskinan*. Diakses 23 April 2022, dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Konsep Manfaat Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses 23 April 2022, dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Konsep Pengangguran*. Diakses 23 April 2022, dari <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>
- Baktiar, A. F., Fadhilah, H., Simatupang, M. D., Warman, M., Vira, S., & Nooraeni, R. (2020). Pengaruh Tindak Korupsi Terhadap Kemiskinan di Negara-Negara Asia Tenggara Dengan Model Panel Data. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(2), 311-320.
- Bambang. (2011, Januari 03). *Inflasi 2010 Capai 6,96 Persen*. *Antaraneews Online*. Diakses dari

- <https://www.antaranews.com/berita/240341/inflasi-2010-capai-696-persen>
Bank Indonesia. (2022). *Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi Pada Triwulan II 2022*. Diakses 22 September 2022, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2420622.aspx
- Bank Indonesia. (2022). *Inflasi 2021 Tetap Rendah (No.24/2/DKom)*. Jakarta, DKI: Erwin Haryono. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_240222.aspx
- Basuki, A. T. dan Imamuddin Yuliadi. (2015). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Makro. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. (2008). *Ekonomi Makro. Edisi Keempat*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta
- BPS. (2022). Indeks Pembangunan Manusia. Diakses tanggal 23 Agustus 2022, dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2022). Persentase Penduduk Miskin Indonesia. Diakses tanggal 23 Agustus 2022, dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Compassion. (2022). *Poverty in Asia*. Diakses tanggal 23 Juni 2022, dari <https://www.compassion.com/poverty/poverty-in-asia.htm>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2022). *Sekilas Tentang Indonesia*. Diakses 22 September 2022, dari <https://kek.go.id/sekilas-tentang-indonesia>
- Dharmmayukti, B., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2019. *jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 21(5).
- Dihni, V. (2021, November 16). *Skor Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkatkan pada tahun 2021*. Databoks. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/skor-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-meningkat-pada-2021>
- Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2019). *Banyaknya Pengangguran Karena Kurangnya Pelatihan Keterampilan Kerja*. Buleleng: Penulis. Diakses dari <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/banyaknya-pengangguran-karena-kurangnya-pelatihan-keterampilan-kerja-11#:~:text=Selanjutnya%20menurut%20International%20Labor%20Organitation,pekerjaan%20serta%20sedang%20mencari%20pekerjaan>.
- Djannata, A. A., & Atmanti, H. D. (2011). Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Semarang dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi-Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 2(2), 110-116.
- Fajar, M., & Azhar, Z. (2019). Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 681-690.
- Falah, A. A. (2019). Kausalitas Korupsi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi pada 8 Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Febriaty, H., & Nurwani, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Franciari, P. S., & Sugiyanto, F. X. (2012). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008

- dan 2010) (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Gujarati, Damodar. (2004). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gumala, F., & Anis, A. (2019). Pengaruh Korupsi, Kualitas Pembangunan Manusia Dan Penanaman Modal Asing (Fdi) Terhadap Kemiskinan Di ASEAN. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 541-552.
- Haifa, R., & Siregar, M. I. (2019). Korupsi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 464-473.
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014. 1 (2), 257-282.
- Hartisa, N., & Putri, D. Z. (2020). Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di Negara Lower Middle Income ASEAN. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4).
- Hidayat, T., Asmanto, P., & Taufik, N. (2022). *Poverty Rate Measurement : International vs National Standards. Australian Government*. Diakses dari www.tnp2k.go.id
- Jefriando, M. (2014, Januari 02). *Ini Penyebab Meroketnya Inflasi 2013, Dari BBM Hingga Rokok Kretek. Detik Finance Online*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2456664/ini-penyebab-meroketnya-inflasi-2013-dari-bbm-hingga-rokok-kretek>
- Kasnelly, F. A. J. S. (2020). Meningkatkan Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 45-60.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Hubungan Persepsi Potensi Korupsi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Analisa Data dari Survei Persepsi Korupsi). *Ikraith Humaniora*, 1(2), 53-60.
- Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Bharanomics*, 1(2), 75-81.
- Klitgard, Robert. (2000). *Controlling Corruption*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia. (2022). *Sekilas Tentang Indonesia*. Diakses 22 September 2022, dari <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20kepulauan%20terbesar,merupakan%20pulau%20utama%20di%20Indonesia>
- Kurnianingsih, T. (2012). *Dimensi Kemiskinan*. Diakses tanggal 30 Juni 2022, dari https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf
- Lipsey, R. G., Steiner, P. O., Purvis, D. D. (1991). *Pengantar Makroekonomi. Edisi 8*. Jakarta: Erlangga.
- Listiyarini, T. (2016, Januari 06). *Ini Penyebab Angka Kemiskinan RI Meningkat*. Berita Satu Online. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/338515/ini-penyebab-angka-kemiskinan-ri-meningkat>
- Mahsunah, D. (2013). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A., & Tumilaar, R. L. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Mankiw, N. Gregory., Quah, Euston., & Wilson, Peter. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanga, Muana. (2005). *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Deddy Darmawan. (2020, Juli 15). *Pandemi Covid-19 Jadi Penyebab Kemiskinan Meningkat*. Republika Online. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qdi4h5370/pandemi-covid19-jadi-penyebab-kemiskinan-meningkat>

- Nawatmi, S. (2013). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi-Studi Empiris 33 Provinsi di Indonesia. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2(1).
- Negin, V., Abd Rashid, Z., & Nikopour, H. (2010). The Causal Relationship between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis (No. 24871). *University Library of Munich, Germany*.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal samudra ekonomika*, 2(1), 53-61.
- Patra, J. I. K. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71-79.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 25-32.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
- Quy, N. H. (2016). Relationship Between Economic Growth, Unemployment and Poverty: Analysis at Provincial Level in Vietnam. *International Journal of Economics and Finance*, 8(12), 113-119.
- Rukmana, I. (2012). Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 1984-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1).
- Sajogyo. (2000). *Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia.
- Samputra, P. L., & Munandar, A. I. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 35-46.
- Setiaji, H. (2020, 04 Mei). *Penyebab Inflasi Rendah: Corona, PHK, dan Susahnya Cari Kerja*. *CNBC Indonesia Online*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200504123307-4-156052/penyebab-inflasi-rendah-corona-phk-dan-susahnyacari-kerja/3>
- Setiawan, S. (2016, Januari 07). *Bank Dunia: 40 Persen Kemiskinan Ada di Negara Berkembang*. *Kompas Online*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2016/01/07/150600026/Bank.Dunia.40.Persen.Kemiskinan.Ada.di.Negara.Berkembang>
- Shofiyah, S. (2019). Korupsi Dan Kemiskinan Dalam Bingkai Pancasila. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(2), 87-96.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suhardi, D. (2019). *Memberantas Kemiskinan dengan Satu Data*. Diakses tanggal 30 Juni 2022, dari <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/memberantas-kemiskinan-dengan-satu-data>
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis. Edisi 1*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Supriyanto, Agus. (2006, 02 September). *Kenaikan Angka Kemiskinan akibat Kegagalan Kebijakan Pemerintah*. *Tempo Online*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/83194/kenaikan-angka-kemiskinan-akibat-kegagalan-kebijakanpemerintah>
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif, ISSN*, 1412-6184.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 7(2), 271-278.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1).
- Talukdar, S. R. (2012). *The Effect of Inflation on Poverty in Developing Countries: A Panel Data Analysis (Doctoral dissertation)*.
- Timorria, I.F. (2021, Februari 15). *Jumlah Penduduk Miskin Tembus 27,55 Juta Akibat Covid-19*. *Bisnis.com*

- Online. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210215/12/1356270/jumlah-penduduk-miskin-tembus-2755-juta-akibat-covid-19>.
- Transparency International Indonesia. (2007). *Corruption Perception Index 2007* . Diakses 23 September 2022, dari <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2007/>
- Transparency International Indonesia. (2020). *Corruption Perception Index 2020* . Diakses 23 September 2022, dari <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2007/>
- Transparency International Indonesia. (2022). *Frequently Asked Question*. Diakses tanggal 24 Juni 2022, dari <https://riset.ti.or.id/frequently-asked-questions/>
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index*. Diakses tanggal 23 Juni 2022, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>
- UNDP. (2022). *Human Development Reports Indonesia*. Diakses tanggal 23 Juni 2022, dari <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN>
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wiguna, V. I., & Sakti, R. K. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42.
- Wisnu. (2010, Januari 04). *Menkeu: Inflasi 2009, Terendah Sepanjang Sejarah*. *Kompas Online*. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/01/04/14553668/menkeu.inflasi.2009.terendah.sepanjang.sejarah>
- Yolanda, Y. (2017). Analysis of Factors Affecting Inflation and its Impact on Human Development Index and Poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4B), 38-56.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31.